

Pengelolaan Biaya Pendidikan

Dedeh Descindang Irnissa¹, Aa Rahmawati², Yuliningsih³, Surani⁴, Bahtiyar Heru Susanto⁵
^{1,2,3,4,5}Pendidikan guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta
descindangedeh@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 28, 2023

Revised July 17, 2023

Accepted July 26, 2023

Keywords:

Management, Cost, schools,
education, funding

ABSTRACT

The management of education costs is an important aspect in ensuring the accessibility, quality, and sustainability of the education system. This article examines strategies and approaches in education cost management at various levels, from primary education to primary education. The main focus is on identifying funding sources, efficient budget allocation, and optimizing the use of funds to improve the quality of learning. The analysis also covers frequently faced challenges and obstacles, such as unequal distribution of funds, cost inflation, and resource constraints. Through a comprehensive, information-based approach, education cost managers can be improved to support long-term education goals and ensure that every individual has a fair opportunity to access quality education. This study concludes that collaboration between the government, educational institutions and the community is very important in creating an effective and sustainable education cost management system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 28, 2023

Revised July 17, 2023

Accepted July 26, 2023

Keywords:

Pengelolaan, Biaya, sekolah,
pendidikan, pendanaan

ABSTRACT

Pengelolaan biaya pendidikan merupakan aspek penting dalam memastikan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sistem pendidikan. Artikel ini mengkaji strategi dan pendekatan dalam manajemen biaya pendidikan di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan dasar. Fokus utama adalah pada identifikasi sumber pendanaan, alokasi anggaran yang efisien, serta optimalisasi penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Analisis ini juga mencakup tantangan dan hambatan yang sering dihadapi, seperti ketimpangan distribusi dana, inflasi biaya, dan keterbatasan sumber daya. Melalui pendekatan yang komperhensif dan berbasis informasi, pengelola biaya pendidikan dapat ditingkatkan untuk mendukung tujuan pendidikan jangka panjang dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses

pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan biaya pendidikan yang efektif dan keberlanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nama penulis: Dedeh Descindang Irnissa
Universitas PGRI Yogyakarta
Email : descindangdedeh@gmail.com

Pendahuluan

Biaya pendidikan merupakan dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran, dan berbagai jenis keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada dasar, pembiayaan pendidikan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Biaya langsung merupakan pengeluaran yang secara langsung untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan sedangkan, biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya tidak secara langsung. Menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah (Efendi Sianturi, 2020:3)

Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang wajar karena mahalnnya biaya yang harus dikeluarkan. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang

diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya.

Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki tenaga yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber belajar, sarana dan prasarana yang meliputi tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta biaya yang mencakup biaya investasi. Biaya untuk personil antara lain untuk kesejahteraan dan pengembangan profesi, sedangkan untuk biaya nonpersonil berupa pengadaan bahan dan ATK, pemeliharaan, dan kegiatan pembelajaran.

Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik

dalam penyelenggaraan Pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan / keuangan. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini, sehingga tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Standar pembiayaan sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Uraian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI SNP). “Pada Bab IX pasal 62 dari PP tersebut disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Agar penyelenggaraan pendidikan disekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik.

Metode

Penelitian Ini merupakan Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan atau suatu penelitian yang objek penelitiannya dipelajari melalui berbagai informasi perpustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, majalah, dan dokumen). (S Hadi:2000). Penulis tinjauan pustaka ini melakukannya dengan meneliti tulisan-tulisan ilmiah seperti buku, artikel, dan jurnal. Dalam penelitian ini, banyak literatur yang dijadikan bahan referensi oleh penulis terkait dengan kebijakan pendidikan pemerintah indonesia. Penulis kemudian mengidentifikasi kesamaan antara data primer dan sekunder yang timbul dari prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi setiap orang untuk memajukan pendidikan di indonesia ke arah yang lebih baik. Penulis memilih metode ini karena efektif dalam meneliti dan menganalisis kebijakan pendidikan pemerintah indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Pengelolaan Biaya Pendidikan

Menuurt (Masditou, 2017:119), Biaya pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan, biaya bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada

pembiayaan operasional yang besar. Penggunaan pembiayaan Pendidikan diorientasikan kepada pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan Dasar Pasal 1 Ayat 5 “Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/ diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan”.

Menurut Fatah (2012:96-97) Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. Menurut permendiknas no. 69 tahun 2009, yang termasuk kedalam biaya pendidikan, antara lain sebagai berikut:

a. Biaya alat tulis sekolah (ATS)

Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.

b. Biaya bahan dan alat habis pakai (AHP)

Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum

keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain, yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.

c. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan

Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar.

d. Biaya daya dan Jasa

Biaya daya dan jasa adalah biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar disekolah atau madrasah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain.

e. Biaya transportasi/perjalanan dinas

Biaya transportasi/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di dalam kota maupun diluar kota.

Biaya pendidikan adalah pengeluaran baik berupa uang atau jasa dalam pendidikan yang digunakan untuk menunjang proses jalannya pendidikan. Sumber biaya pendidikan berasal dari pemerintah, orangtua, dan masyarakat sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan agar dapat diperoleh pendidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan apa yang di

programkan. Pengelolaan biaya pendidikan merupakan faktor penting dalam pendidikan yang telah dialokasikan pada sistem pengelolaan secara administratif untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu baik bagi siswa maupun tenaga kependidikan.

B. Perencanaan Biaya Pendidikan

Perencanaan pendidikan tidak lain merupakan penerapan konsep perencanaan pada bidang pendidikan, sehingga unsur-unsur yang disebutkan pada hakikat perencanaan berlaku juga untuk bidang pendidikan. Menurut (Ulbert silalahi:2015) Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan sumber daya manusia, sumber informasi, finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penyapaian tujuan. Sedangkan willian H. Newman dalam Abdul Majid: Mengemukakan bahwa “perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari”.

Dari pengertian di atas perencanaan dapat diartikan sebagai kegiatan menentukan tujuan dan merumuskan serta mengatur pendayagunaan sumber-sumber daya informasi, finansial, metode dan waktu yang di ikuti dengan pengambilan keputusan serta penjelasannya tentang pencapaian tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-

metode dan prosedur tertentu dan penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Menurut purwanto (1998) Tahapan yang dilakukan dalam perencanaan meliputi: 1) Menentukan dan merumuskan tujuan yang akan dicapai, 2) melakukan penelitian masalah atau kegiatan yang akan dilakukan 3) Mengumpulkan data dan beberapa informasi yang dibutuhkan. 4) Menentukan tahapan atau rangkaian tindakan. 5) Merumuskan bagaimana masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana masalah kegiatan tersebut dapat terselesaikan.

Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan namun yang memainkan peranan sentral adalah bagaimana memanfaatkan human resources (potensi manusia) dan sumber daya yang ada di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk sumber dana yang tersedia.

Menurut Udin Syaifudin Saud (2007), perencanaan pendidikan meliputi :

- a) Kajian terhadap hasil perencanaan pembangunan pendidikan sebelumnya sebagai titik berangkat perencanaan. Ini digambarkan dalam visi dan misi sekolah.
- b) Rumusan tentang tujuan umum perencanaan pendidikan yang merupakan arahan yang harus dijadikan fokus kegiatan perencanaan.
- c) Pengembangan program dan proyek sebagai operasionalisasi prioritas yang ditetapkan merupakan penjabaran visi dan misi.

- d) Scheduling dalam arti mengatur dan menentukan dua aspek yaitu keseluruhan program, dan prioritas secara teratur dan cermat karena penjadwalan ini secara makro mempunyai arti tersendiri yang amat strategis bagi seluruh pelaksanaan perencanaan.
- e) Implementasi rencana termasuk di dalamnya proses legalisasi dan persiapan tim aparat pelaksanaan rencana mulainya suatu kegiatan, monitoring dan controlling untuk membatasi kemungkinan yang tidak terpuji yang dapat merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan rencana.
- f) Evaluasi dan revisi yang merupakan kegiatan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegiatan untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan baru yang berkembang dan tindak lanjut sebagai evaluasi.

Perencanaan dalam pengelolaan biaya pendidikan berbasis sekolah meliputi dua aktivitas yaitu sistematisasi anggaran dan pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

- a) Sistematisasi penyusunan anggaran pendidikan

Anggaran adalah suatu rencana operasional yang dibuktikan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan instansi pada jangka waktu tertentu. Sistematisasi anggaran merupakan penggambaran terhadap aktivitas yang dilakukan oleh instansi pendidikan sehingga dapat diketahui ketentuan biaya pada

setiap kegiatan. (Hani Handoko:2009) Anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan, pengontrolan juga sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan. Selain anggaran mempunyai masalah atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis sebagai alat penafsir, alat kewenangan dan alat efisiensi. Implementasi ini sesuai dengan pandangan bahwa anggaran biaya berperan sebagai alat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan.

- b) Pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Proses pengembangan RKAS pada umumnya melewati tahap-tahap pendekatan prosedur sebagai berikut:

Pada tingkatan kelompok kerja dibentuk sekolah yang terdiri dari para pembantu kepala sekolah yang mempunyai peran di antaranya melaksanakan identifikasi kepentingan-kepentingan biaya yang harus dikeluarkan setelahnya digolongkan menurut dengan kebutuhan biaya yang dilaksanakan, seleksi alokasi yang ditaksir sangat mendesak dan tidak dapat dikurangi, melainkan ketika rencana tersebut tidak menghambat kelancaran proses pendidikan terlebih proses belajar mengajar, maka bisa dilaksanakan penyusunan biaya benar dengan dana yang ada.

C. Menganalisis

Pelaksanaan



Pengelolaan Biaya Pendidikan

Menurut Sherly, dkk(2020:132) Pelaksanaan atau penerapan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan atau ditetapkan dalam suatu kolaborasi pendidikan yang produktif. Pelaksanaan juga berarti mengarahkan, memberi dorongan, dan memerintah. Dengan demikian pelaksanaan dalam pengelolaan biaya pendidikan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien agar berjalan dengan baik.

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan biaya pendidikan.

Secara umum dalam pendidikan, sistem pengelolaan biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua aktivitas yaitu penerimaan dan pengeluaran atau pemakaian:

a) Penerimaan

Penerimaan sekolah khususnya dalam hal keuangan berasal dari berbagai sumber-sumber dana. Hal ini tentunya perlu adanya pembukuan yang jelas dan tentunya sesuai berdasarkan kebijakan yang konsisten dengan keputusan yang telah disetujui dengan konsep dari pemerintah. Secara teori dalam penerimaan dana terdapat beberapa pendekatan dalam pengaplikasiannya, namun dalam pengelolaan pendidikan pada sekolah terdapat ciri yang sama. (Nanang

Fattah:2020)

Kebijakan dalam pembukuan penerimaan dana sekolah pada lingkungan divisi pusat menganut pandangan antara peraturan pemerintah pusat dan sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan biaya pendidikan yang masuk, namun tidak semua biaya yang ada dapat dikelola menurut kebijakan sekolah karena terdapat kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan petunjuk mengenai penggunaan atau pemakaian yang harus diikuti oleh sekolah sehingga sekolah tidak boleh menyalahgunakan dana tersebut. Terlebih sekolah merupakan penggerak atau pengelola dalam tingkatan makro sehingga pengelolaan keuangan hanya sebatas pengelolaan dana pada tingkatan operasional.

Penerimaan biaya pendidikan diperoleh dari sumber pembiayaan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah, peningkatan mutu layanan pendidikan sulit dicapai. Salah satu cara yang mencakup efektif untuk mencari sumber biaya pendidikan adalah mengerahkan sumber dari masyarakat, seperti tenaga, bahan bangunan, dana yang mungkin belum banyak dimanfaatkan. Oleh sebab itu, masyarakat harus menyadari jika pembayaran dana yang bersumber dari masyarakat sangat membantu keuangan sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan. (Nasir Usman)

b) Pengeluaran

Menurut (Mochammad idhoci Anwar) Kegiatan pengeluaran biaya pendidikan tentu tidak menyimpang dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Pengeluaran biaya pendidikan dipergunakan secara efektif dan efisien. Pengeluaran harus berdasarkan pada kebutuhan yang telah direncanakan. Upaya pemenuhan kebutuhan sekolah mengutamakan kebutuhan penting dengan membuat skala prioritas.

Biaya pengeluaran yaitu bentuk dari pengeluaran biaya yang berkaitan dengan sesuatu atau apapun yang berhubungan dengan kebutuhan awal sampai dengan akhir proses pembelajaran di sekolah. Contoh dari kebutuhan awal seperti materi pendidikan, perlengkapan, dan fasilitas, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Pada ilmu manajemen perihal keuangan sekolah, pembukuan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan tetap memperhatikan peraturan yang ada. Maka dari itu pemasukan maupun pengeluaran yang pembukuan yang tertulis sehingga dapat memudahkan bagi siapapun dan meminimalisir terjadinya pengeluaran yang disalah gunakan.

Penyelenggaraan pembukuan, terdapat pertanggung jawaban pembukuan yang dalam penyusunan memiliki sejumlah hal yang wajib dijadikan landasan oleh bendahara seperti buku sekertaris, format buku kas harian dan laporan daya tampung pemakaian anggaran dan juga beban pajak. Selain itu untuk mencatat pengeluaran berdasarkan tujuan dan

kapannya terjadinya (E.Mulyasa:2021). Kepala sekolah merupakan pelaksana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pengembangan rencana keuangan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai aspek rencana administrasi.

Berdasarkan sudut pandang tersebut keuangan sekolah harus bisa memberikan peningkatan serta pemahaman teori maupun konsep mengenai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pada pengelolaan biaya pendidikan keuangan sekolah, selain sebagai penanggung jawab perencanaan keuangan sekolah kepala sekolah juga memiliki peran dalam menyusun anggaran belanja sekolah dan dibantu oleh delegasi yang telah diputuskan boleh kebijakan sekolah di bawah pemantauan pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya.

Proses pengelolaan biaya pendidikan harus dilakukan sesuai prinsip manajemen pembiayaan, yakni transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Dalam hal perealisasi anggaran, dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan lembaga pendidikan. Khususnya kegiatan belajar manajer secara efektif dan efisien. Setiap perolehan dana, pengeluarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

D. Mengevaluasi Pengelolaan Biaya Pendidikan

Evaluasi pengelolaan biaya pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberi kualitas nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkesinambungan, terencana dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut, ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu:

1. Memfokuskan Evaluasi
2. Mendesain Evaluasi
3. Mengumpulkan Informasi
4. Menganalisis Informasi
5. Melaporkan Hasil Informasi
6. Mengelola Evaluasi dan mengevaluasi

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staf sesuai kinerja yang ditunjukkan dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengatur tingkat efektifitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Mengamati tingkat efektifitas maksudnya menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan

itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, yang berarti apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal.

E. Permasalahan dalam Pengelolaan Biaya Pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Aksebilitas Terbatas: Banyak keluarga, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah, kesulitan untuk mengakses pendidikan karena biaya yang tinggi.
2. Disparitas Kualitas: Terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta seringkali menawarkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi, tetapi dengan biaya yang juga lebih mahal. Di sisi lain, sekolah negeri mungkin kurang dalam fasilitas dan sumber daya.
3. Beban Biaya yang Berat: Biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi beban yang berat bagi sebagian keluarga, bahkan menyebabkan anak-anak mereka terpaksa putus sekolah.

F. Solusi untuk Mengatasi

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Peningkatan Akses terhadap Beasiswa dan Bantuan Keuangan: Pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana untuk program beasiswa dan bantuan keuangan kepada keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini akan membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi mereka yang membutuhkan.
2. Peningkatan Infrastruktur Sekolah Negeri: Investasi dalam infrastruktur sekolah negeri akan meningkatkan kualitas pendidikan yang tersedia secara gratis atau dengan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
3. Pengembangan Program Pendidikan Alternatif
Pengembangan program pendidikan alternatif seperti pendidikan online atau kursus jarak jauh dapat membantu mengurangi biaya pendidikan dengan tetap memberikan akses yang baik kepada pendidikan berkualitas.

Kesimpulan

Biaya pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan, biaya bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan

pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. Pengelolaan biaya pendidikan merupakan faktor penting dalam pendidikan yang telah dialokasikan pada sistem pengelolaan secara administratif untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu baik bagi siswa maupun tenaga kependidikan.

Perencanaan pendidikan tidak lain merupakan merupakan penerapan konsep perencanaan pada bidang pendidikan, sehingga unsur-unsur yang disebutkan pada hakikat perencanaan berlaku juga untuk bidang pendidikan. Perencanaan dalam Pengelolaan biaya pendidikan berbasis sekolah meliputi dua aktivitas yaitu sistematisasi anggaran dan pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan biaya pendidikan.

Sistem pengelolaan biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua aktivitas yaitu penerimaan dan pengeluaran atau pemakaian. Tahap terakhir yaitu evaluasi pembiayaan pendidikan yang erupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang direncanakan pada saat planning. Hasil evaluasi kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan memastikan bahwa dana pendidikan tersebut memberikan manfaat yang maksimal.

Daftar Pustaka



- E. Mulyasa (2021) Manajemen Berbasis Sekolah, (Banten: Universitas Terbuka).
- Fatah, Nanang (2012) Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Masditou. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang bermutu. Jurnal ANSIRU PAI Vol. 1 No. 2.
- Makmun: Udin Syaefudin Sa'ud; Abin syamsuddin. (2007) Perencanaan pendidikan: suatu pendekatan komprehensif / Udin Syaefudin Sa'ud. Rosdakarya.
- Mochammad Idhoci Anwar (2004) Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Alfabeta)
- Nasir Usman, Muniarti (2010) Pengantar Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Animage)
- Nanang Fattah (2020) Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Ngalim Purwanto, (1998) Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya hlm.15
- Riski, A. (2019). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia.
- Santoso, Tri. (2019). "Disparitas Mutu Pendidikan antara Sekolah Negeri dan Swasta: Bukti dari Indonesia." Jurnal Internasional Pendidikan dan Pembangunan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 15(3), 76-88.
- Silalahi, Ulber, dan Sabda Ali Mifka. (2015). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
- Sherly, Leni Nurhayati, Hery Yanto, dkk (2020) Manajemen Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktis, (Bandung: Widina Bhakti Persada)
- T. Hani Handoko (2009) Manajemen, (Yogyakarta: Balai Pustaka Fakultas Ekonomi)
- Widodo, Bambang. (2020). "Tantangan Aksesibilitas Pendidikan di Daerah Pedesaan: Studi Kasus di Indonesia." Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(2), 112-125.